



Pengaruh Implementasi QRIS terhadap Efektivitas Sistem Pembayaran di Pemerintah Daerah

(Studi Kasus pada Kantor Samsat Kota Kupang)

Kitty Monica Horo¹, Maria P.L. Muga², Filipus A.G. Suryaputra³, Novi Theresia Kiak⁴

¹⁻⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Cendana

*Penulis Korespondensi: kittyhoro2202@gmail.com¹

Abstract. *The development of digital financial technology in Indonesia has encouraged the shift towards non-cash payment methods that are more practical, fast, and secure. One of the innovations introduced is the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), which has been widely applied, including in public services. The Kupang City Government, through the Samsat Office, has implemented QRIS as a payment method for motor vehicle taxes to improve the effectiveness of the payment system. This study aims to analyze the effect of QRIS implementation on the effectiveness of the motor vehicle tax payment system at the Kupang City Samsat Office. This research employed a quantitative approach with a case study method. Primary data were collected through questionnaires administered to 40 taxpayers using QRIS and interviews with Samsat employees. Data were analyzed using simple linear regression. The results indicate that the implementation of QRIS has a positive and significant effect on the effectiveness of the payment system. QRIS has proven to simplify transactions, reduce queues, improve recording accuracy, and support transparency in local tax revenue collection. Interview findings also reinforce the quantitative results, showing that ease of use and time efficiency are the main factors for taxpayers choosing QRIS, despite challenges such as limited infrastructure in mobile Samsat services and low digital literacy among the community.*

Keywords: *Local Government; Motor Vehicle Tax; Non-Cash Payment; Payment System Effectiveness; QRIS*

Abstrak. Perkembangan teknologi keuangan digital di Indonesia mendorong masyarakat untuk beralih pada metode pembayaran non-tunai yang lebih praktis, cepat, dan aman. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang telah digunakan secara luas, termasuk dalam layanan publik. Pemerintah Kota Kupang melalui Kantor Samsat menerapkan QRIS sebagai metode pembayaran pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan efektivitas sistem pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi QRIS terhadap efektivitas sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada 40 wajib pajak pengguna QRIS dan wawancara dengan pegawai Samsat. Analisis data dilakukan dengan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem pembayaran. QRIS terbukti mempermudah proses transaksi, mengurangi antrean, meningkatkan akurasi pencatatan, serta mendukung transparansi penerimaan pajak daerah. Hasil wawancara juga menguatkan bahwa kemudahan penggunaan dan efisiensi waktu menjadi faktor utama wajib pajak memilih QRIS, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur pada layanan Samsat Keliling dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Sistem Pembayaran; Pajak Kendaraan Bermotor; Pembayaran Non-Tunai; Pemerintah Daerah; QRIS

1. LATAR BELAKANG

Era digital saat ini berbagai sektor dalam masyarakat semakin bergantung pada teknologi. Salah satunya sektor keuangan (*Fintech*) yang menghadirkan inovasi baru dalam melakukan transaksi untuk masyarakat dengan menciptakan suatu metode pembayaran baru (Annisa dkk., 2024). Perkembangan teknologi dan informasi yang maju akan membantu pertumbuhan ekonomi digital dan percepatan inklusi keuangan suatu negara. Salah satu bentuk implementasi dari metode pembayaran baru adalah pembayaran transaksi non-tunai

atau yang bisa disebut uang elektronik.

Penggunaan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, didorong oleh jumlah penduduk yang besar serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap inklusi keuangan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp835,84 triliun pada tahun 2023, meningkat 43,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan uang elektronik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan total nilai transaksi uang elektronik dan nilai transaksi transfer antar uang elektronik di Indonesia selama enam tahun terakhir yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Total Nilai Transaksi Uang Elektronik & Nilai Transaksi Transfer Antar Uang Elektronik di Indonesia Tahun 2019-2024

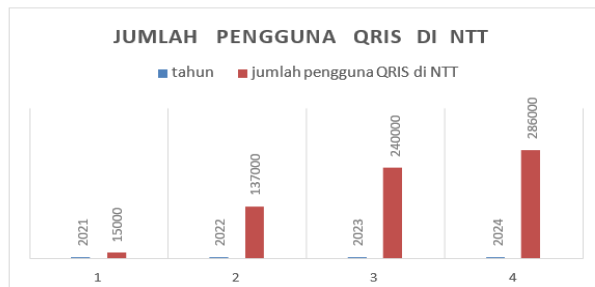
Tahun	Nilai Transaksi Uang Elektronik (Triliun Rupiah)	Nilai Transaksi Transfer (Triliun Rupiah)
2019	145,17	22,4
2020	204,91	38,7
2021	305,44	177,1
2022	835,84	399,6
2023	1.189,0	495,2
2024	2.503,9	539,81

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan total nilai transaksi uang elektronik dan nilai transaksi transfer antar uang elektronik juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan peningkatan adopsi teknologi digital dalam transaksi keuangan di masyarakat. Masyarakat semakin beralih dari metode pembayaran konvensional ke sistem pembayaran non-tunai, yang menawarkan kemudahan dan efisiensi. Selain itu, nilai transaksi transfer antar uang elektronik juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari hanya Rp22,4 triliun pada 2019 menjadi Rp495,2 triliun pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan keuangan digital telah menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi nasional dan mendukung *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) merupakan standarisasi kode QR Nasional yang dirilis oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019 dan resmi diaktifkan pada 1 Januari 2020. Melalui QRIS sebagai salah satu inovasi penting dalam sistem pembayaran digital di Indonesia memiliki tujuan untuk memfasilitasi transaksi non-tunai dengan cara yang lebih efisien, cepat, dan aman (Bank Indonesia, 2019).

Peningkatan yang signifikan juga terlihat di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Kantor Bank Indonesia Wilayah Perwakilan Nusa Tenggara Timur mencatat bahwa transaksi dengan menggunakan sistem pembayaran QRIS pada Januari 2024 mengalami peningkatan

sebesar 141% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Pada Januari 2023, jumlah nominal transaksi non-tunai menggunakan QRIS mencapai Rp32 miliar, sedangkan pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp77 miliar. Berikut adalah grafik yang menampilkan jumlah pengguna QRIS di NTT 2021 – 2024 yang disajikan dalam Gambar 1.1:



Gambar 1. Grafik Jumlah Pengguna QRIS di NTT 2021-2024

Berdasarkan grafik di atas, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan tingginya tingkat adopsi sistem pembayaran digital oleh masyarakat di NTT, yang sebelumnya merupakan wilayah dengan tingkat inklusi keuangan yang relatif rendah. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain dukungan kebijakan dari pemerintah dan Bank Indonesia, seperti percepatan digitalisasi daerah melalui TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) yang berperan dalam mendukung pemerintah daerah dalam melakukan digitalisasi transaksi keuangan termasuk ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) (Zahra, 2024).

Penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran memang memberikan banyak kemudahan, tetapi juga memiliki risiko, seperti potensi penipuan melalui manipulasi kode QR (Rangkuti, 2024). Menurut Antara News (2024), adopsi QRIS di Nusa Tenggara Timur, termasuk Kota Kupang, mengalami pertumbuhan signifikan. Hingga Juni 2024, tercatat 8,75 juta transaksi menggunakan QRIS di wilayah ini, meningkat 148% dibandingkan Desember 2023, dengan total nominal mencapai Rp942 miliar. Jumlah responden yang menggunakan QRIS juga mencapai 239 ribu, dengan 293 ribu pengguna aktif. Berbagai inisiatif dan pertumbuhan positif telah mendorong implementasi QRIS di Kota Kupang, tetapi masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital, serta biaya transaksi yang dianggap tinggi.

Kantor Samsat Kota Kupang merupakan salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem pembayaran pajak, pemerintah telah mendorong penggunaan metode pembayaran digital,

termasuk implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Penerapan QRIS diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan transaksi secara non-tunai, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak. Dampak dari implementasi QRIS terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah juga menjadi salah satu aspek penting dalam penelitian ini. Jika QRIS dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam pembayaran, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah yang lebih optimal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Implementasi QRIS terhadap Efektivitas Sistem Pembayaran di Pemerintah Daerah”, penelitian ini akan berfokus pada Kantor Samsat Kota Kupang. Penelitian ini akan melihat sejauh mana QRIS telah memberikan dampak dalam meningkatkan efisiensi pembayaran, transparansi penerimaan pajak, serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem pembayaran QRIS, sehingga dapat mendukung pelayanan publik yang lebih efisien serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat yang telah diperoleh serta tantangan yang masih harus diatasi dalam mengoptimalkan penggunaan QRIS.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Agensi menjelaskan bahwa suatu konflik timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam konteks ini, pemerintah daerah melalui Samsat bertindak sebagai prinsipal, dan wajib pajak sebagai agen. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana QRIS dapat mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas antara kedua belah pihak, karena setiap transaksi tercatat secara otomatis (Ghozali, 2020)

Technology Acceptance Model (TAM)

Model ini menjelaskan penerimaan teknologi berdasarkan dua faktor utama: *perceived usefulness* atau *manfaat* yang dirasakan, dan *perceived ease of use* atau *kemudahan* penggunaan. Saya mengkaji bagaimana wajib pajak merasakan manfaat dan kemudahan QRIS, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk mengadopsi sistem pembayaran ini (Ghozali, 2020)

Theory of Reasoned Action (TRA)

Teori ini membantu memahami bagaimana sikap positif wajib pajak terhadap QRIS, ditambah dengan norma-norma subjektif seperti dukungan pemerintah dan sosialisasi, memengaruhi niat mereka untuk menggunakan QRIS (Ghozali, 2020).

Sistem pembayaran elektronik (electronic payment system)

Didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya dapat meningkatkan produktivitas (Hutahaean dkk., 2024). Sistem pembayaran elektronik/non- tunai memungkinkan berbagai platform atau alat pembayaran digital, seperti kartu kredit, kartu debit, transfer bank *online*, dompet digital (*e-wallet*), serta kode QR seperti QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Sistem pembayaran elektronik (*electronic payment system*) dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya dapat meningkatkan produktivitas (Hutahaean dkk., 2024).

Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Budo dkk., (2020), “Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif”. Menurut Puriati dkk. (2023), “Efektivitas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan”. Efektivitas sistem pembayaran dapat diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti kecepatan transaksi, akurasi data, kemudahan akses, serta tingkat kepatuhan pengguna ((Afandi dkk., 2022). Dalam penelitian ini, efektivitas QRIS diharapkan dapat terlihat dari pengurangan waktu antrean, peningkatan jumlah transaksi non-tunai, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Pendekatan ini memungkinkan saya untuk menguji hubungan kausal antara variabel implementasi QRIS dan efektivitas sistem pembayaran. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang diperoleh melalui kuesioner, dan data kualitatif dari wawancara serta dokumentasi. Sumber data utama adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari wajib

pajak pengguna QRIS dan wawancara dengan pegawai Samsat.

Lokasi penelitian adalah Kantor Samsat Kota Kupang, dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2025. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak yang menggunakan QRIS di Kota Kupang. Untuk sampel, saya menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 40 responden, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti wajib pajak aktif, berdomisili di Kota Kupang, berusia minimal 18 tahun, dan pernah menggunakan QRIS untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Teknik pengumpulan data meliputi penyebaran kuesioner, wawancara mendalam dengan pegawai Samsat, dan studi dokumentasi. Terakhir, teknik analisis data yang saya gunakan adalah statistik deskriptif, uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), analisis regresi linear sederhana, dan uji hipotesis."

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemiringan distribusi). Distribusi statistik deskriptif masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi Qris (X)	40	37	50	47,1250	3,19605
Efektivitas Sistem Pembayaran (Y)	40	39	50	47,3000	3,49505

Berdasarkan Tabel 2 di atas, variabel Implementasi QRIS memiliki nilai rata-rata 47,1250, menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa QRIS mudah digunakan, cepat, dan mendukung transparansi pembayaran. Sementara itu, variabel efektivitas sistem pembayaran memiliki rata-rata 47,3000, yang berarti mayoritas responden menilai sistem pembayaran efektif. Nilai rata-rata tinggi pada kedua variabel ini mengindikasikan adanya hubungan positif potensial antara implementasi QRIS dan efektivitas sistem pembayaran.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dinyatakan valid jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05 atau nilai $P\text{ (sig.)} < 0,05$)

maka instrumen pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Hasil uji validitas masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel Penelitian	Pernyataan	r-Hitung	r-Tabel	P (sig.)	Keterangan
Implementasi QRIS (X)	P1	0,488	0,312	<0,001	Valid
	P2	0,650	0,312	<0,001	Valid
	P3	0,699	0,312	<0,001	Valid
	P4	0,590	0,312	<0,001	Valid
	P5	0,518	0,312	<0,001	Valid
	P6	0,518	0,312	<0,001	Valid
	P7	0,671	0,312	<0,001	Valid
	P8	0,687	0,312	<0,001	Valid
	P9	0,765	0,312	<0,001	Valid
	P10	0,677	0,312	<0,001	Valid
Efektivitas Sistem Pembayaran (Y)	P1	0,736	0,312	<0,001	Valid
	P2	0,580	0,312	<0,001	Valid
	P3	0,708	0,312	<0,001	Valid
	P4	0,658	0,312	<0,001	Valid
	P5	0,732	0,312	<0,001	Valid
	P6	0,803	0,312	<0,001	Valid
	P7	0,701	0,312	<0,001	Valid
	P8	0,625	0,312	<0,001	Valid
	P9	0,745	0,312	<0,001	Valid
	P10	0,806	0,312	<0,001	Valid

Sumber: Olahan Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 3 diatas menunjukkan masing-masing item pernyataan pada setiap variabel baik independen maupun dependen memiliki nilai r-hitung > r-tabel maka datanya yang didapat dilapangan dapat dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Pernyataan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Syarat	Keterangan
Implementasi QRIS (X)	10	0,753	0,6	Reliabel
Efektivitas Sistem Pembayaran (Y)	10	0,769	0,6	Reliabel

Sumber: Olahan Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel implementasi QRIS sebesar 0,753, dan untuk variabel efektivitas sistem pembayaran sebesar 0,769. Nilai tersebut lebih besar dari nilai standar minimum yaitu 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada kedua variabel tersebut adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk melihat data yang digunakan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak. Pada uji asumsi yang dilakukan terdapat 3 uji yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil dari 3 uji yang digunakan.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

<i>Kolmogorove Smirnov</i>	<i>Asymp.Sig</i>	Kriteria	Keterangan
1,305	0,066	> 0,05	Berdistribusi Normal

Sumber: Olahan Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan pada *Asym.sig* sebesar 0,066 yang dapat dikatakan nilai *asym.sig* 0,066 lebih besar dari pada 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF).

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	keterangan
Implementasi QRIS	1.000	1.000	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Olahan Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil Tabel 4.5 menunjukkan bahwa implementasi QRIS memiliki nilai *tolerance* sebesar 1.000 ($> 0,10$) dan nilai VIF sebesar 1.000 (< 10). Sehingga dapat dikatakan data tidak mengalami multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan Uji Glejser, dari penjelasan diatas hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji glesjer dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Syarat	Sig.	Keterangan
Implementasi QRIS	>0,05	0,06	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Olahan Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel Implementasi QRIS 0,06 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel tersebut.

Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara satu variabel bebas (independen) dengan satu variabel terikat (dependen), serta untuk menunjukkan arah hubungan antara kedua variabel tersebut, apakah bersifat positif atau negatif. Analisis ini akan membentuk sebuah persamaan linear sederhana, yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variabel	Koefisien β
Konstanta	5,365
Implementasi QRIS	0,890

Sumber: Olahan Data Primer Peneliti (2025)

$$Y = 5,365 + 0,890X$$

Berdasarkan persamaan regresi sederhana di atas, menunjukkan nilai konstanta sebesar 5,365 yang berarti bahwa ketika nilai implementasi QRIS bernilai konstan atau 0, maka nilai efektivitas sistem pembayaran akan sebesar 5,365. Nilai koefisien dari implementasi QRIS sebesar 0,890. Ini menunjukkan jika implementasi QRIS meningkat sebesar 1, maka efektivitas sistem pembayaran akan mengalami kenaikan sebesar 0,890.

Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk melakukan pembuktian hipotesis yang didasarkan pada penelitian yang sudah ada. Pengujian ini meliputi uji t (Parsial).

Uji t (Parsial)

Uji t (Parsial) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel implementasi QRIS berpengaruh signifikan secara parsial terhadap efektivitas sistem pembayaran. Untuk memberikan interpretasi terhadap uji t (Parsial) dapat dilihat dari hasil penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t-Hitung	Sig.	t-Tabel	Syarat	Keterangan
Implementasi QRIS (X)	8,630	< 0,001	1,685	0,05	Signifikan

Sumber: Olahan Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 4.8, hasil uji t (Parsial) menunjukkan $t_{hitung} = 8,630 > t_{tabel} = 1,685$ dan signifikansi $0,001 < 0,05$. Dengan demikian, H_a diterima: implementasi QRIS berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Uji determinasi dapat dilihat melalui *R Square*, nilai *R Square* dikatakan baik jika diatas 0,052. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.745 ^a	0.662	0.653	2.05799

Sumber: Olahan Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, diperolehnya nilai Adjusted R-squared sebesar 0,653. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu implementasi QRIS mampu mempengaruhi atau menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu efektivitas sistem pembayaran besar 65,3%, sedangkan 34,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam pengujian ini seperti jaringan internet, tingkat literasi digital, dan tingkat kepuasan pengguna.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menunjukkan nilai $t_{hitung} = 8,630 > t_{tabel} = 1,685$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa implementasi QRIS berpengaruh terhadap efektivitas sistem pembayaran dapat diterima. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) juga menunjukkan bahwa variasi efektivitas sistem pembayaran dapat dijelaskan oleh implementasi QRIS sebesar 65,3%, dan sisanya 34,7% dipengaruhi faktor lain seperti jaringan internet, tingkat literasi digital, dan tingkat kepuasan pengguna.

Dari hasil analisis regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa semakin

baik implementasi QRIS yang ditandai dengan kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, dan keterjangkauan, maka semakin meningkat pula efektivitas sistem pembayaran yang meliputi aspek ketepatan pencatatan, transparansi, dan efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak. Hasil ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menekankan pentingnya persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dalam menentukan penerimaan teknologi oleh pengguna. Wajib pajak yang merasa bahwa QRIS mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata akan lebih cenderung menggunakannya, sehingga mendukung efektivitas sistem pembayaran.

Selanjutnya, temuan ini juga sesuai dengan *Theory of Reasoned Action* (TRA), di mana sikap positif wajib pajak terhadap penggunaan QRIS serta norma sosial dari lingkungan sekitar (misalnya dorongan dari petugas Samsat dan sosialisasi pemerintah) mendorong terbentuknya niat untuk menggunakan QRIS dalam melakukan pembayaran. Hal ini juga didukung oleh teori Agensi, yang menjelaskan bahwa implementasi QRIS dapat mengurangi asimetri informasi dan moral hazard karena transaksi dilakukan secara digital, tercatat otomatis, dan lebih sulit untuk dimanipulasi, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah.

Hasil wawancara dengan dua pegawai Samsat Kota Kupang juga memperkuat temuan kuantitatif ini. Salah satu pegawai menyatakan bahwa dengan adanya QRIS, antrean wajib pajak semakin berkurang, terutama pada jam-jam sibuk, karena proses transaksi menjadi lebih cepat dan tidak membutuhkan uang tunai. Pegawai lain menambahkan bahwa sistem pencatatan juga menjadi lebih akurat, karena setiap transaksi langsung tercatat dalam sistem perbankan, sehingga meminimalisir kesalahan perhitungan manual. Namun demikian, keduanya juga mengakui masih terdapat kendala di lapangan, terutama pada layanan Samsat Keliling, di mana jaringan internet yang tidak stabil membuat QRIS belum dapat digunakan secara optimal. Selain itu, masih ada sebagian wajib pajak yang kurang familiar dengan pembayaran digital karena rendahnya literasi digital, sehingga petugas harus memberikan arahan lebih dahulu agar proses pembayaran bisa berjalan lancar.

Kendala lain yang ditemukan adalah adanya kebiasaan sebagian wajib pajak yang masih merasa lebih nyaman membayar secara tunai, meskipun sudah tersedia opsi non-tunai melalui QRIS. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu dan sosialisasi yang lebih intensif. Pemerintah

daerah melalui Samsat perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait keunggulan QRIS yang cepat, aman, dan transparan, agar semakin banyak wajib pajak yang beralih ke sistem pembayaran non-tunai ini.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa implementasi QRIS bukan hanya sekadar inovasi teknologi, melainkan juga instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dengan QRIS, Kantor Samsat Kota Kupang dapat mempercepat alur pelayanan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah. Ke depan, penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi masyarakat, serta perluasan layanan QRIS hingga Samsat Keliling menjadi langkah penting agar manfaat implementasi QRIS dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi QRIS berperan penting dalam meningkatkan efektivitas sistem pembayaran di Kantor Samsat Kota Kupang, sejalan dengan teori-teori pendukung dan realitas di lapangan. Meskipun terdapat sejumlah kendala teknis dan non-teknis, namun secara keseluruhan QRIS terbukti menjadi solusi yang relevan dalam mendukung modernisasi sistem pembayaran pajak daerah di era digital.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa implementasi QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem pembayaran di Kantor Samsat Kota Kupang sebesar 65,3%. Hal ini dikarenakan QRIS mampu mempercepat proses transaksi sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, penggunaan QRIS meningkatkan kenyamanan karena pembayaran dapat dilakukan secara non- tunai tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Tingkat keamanan transaksi juga lebih tinggi, sebab QRIS meminimalisir risiko kesalahan pencatatan manual dan potensi kebocoran dana. Seluruh transaksi yang tercatat secara otomatis dan real-time mendukung transparansi serta memudahkan pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan temuan penelitian dan kendala yang dihadapi, disarankan agar Kantor Samsat Kota Kupang terus memperkuat layanan pembayaran non-tunai melalui QRIS, baik dari sisi infrastruktur maupun kemudahan akses, disertai sosialisasi berkelanjutan hingga layanan Samsat keliling serta perluasan kerja sama dengan perbankan untuk menjaga keamanan dan jangkauan sistem. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas wilayah atau objek kajian, menambah variabel seperti kualitas jaringan, literasi digital, dan

kepuasan pengguna, serta mempertimbangkan metode campuran agar hasil lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan teknologi pembayaran digital.

DAFTAR REFERENSI

- Aktual, NTT. (2024, November 19). *Pemerintah Kota Kupang kembali raih predikat informatif dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2024*. Retrieved from <https://nttaktual.net/2024/11/19/pemerintah-kotakupang-kembali-raihpredikat-informatif-dalam-pemeringkatan-keterbukaan-informasi-publik-tahun-2024/>
- Amanda, Z. I. (2021). Implementasi kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Pontianak. *PROMASTER: Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*, 2(2), 45–46. Retrieved from <https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/promaster/article/view/3401/10001421>
- Annisa, N. N., Irwanah, L., Rosa, N. I., Al Adawiyah, C. D., Ranggika, R., & Karimah, S. A. (2024). Implementasi QRIS metode pembayaran digital pada kualitas peningkatan UMKM di masyarakat Desa Rancabungur. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 97–104. <https://doi.org/10.47776/praxis.v2i1.749>
- Budo, A., Tulus, F., & Tampi, G. B. (2020). Efektivitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94), 1–13. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/29820>
- Edam, N. S., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Efektivitas program Cerdas Command Center sebagai media informasi masyarakat dalam rangka pelayanan publik (Studi di Kantor Walikota Manado). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 12–23. Retrieved from <http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/promaster/article/view/3401/10001421>
- Ghozali, I. (2016). *Desain penelitian kuantitatif kualitatif untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory*. Semarang: Yoga Pratama.
- Gujarati, D. N. (2003). *Dasar-dasar ekonometrika* (4th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Hutahae, L., Shabrina, A. R., Martiani, Y., Syakduzzaman, Yulia, A., & Gunard. (2024). Peran sistem pembayaran digital dalam meningkatkan penjualan UMKM. *Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika (TEKOMIN)*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/10.59820/tekomin.v3i1.325>
- Indah Kusumaningtyas, F., & Budiantara, M. (2023). Pengaruh penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman sejak pandemi COVID-19. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1603–1606. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.236>
- Indonesia, Bank. (2019). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Retrieved from <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01061/en-us>
- Kompas, Tim Redaksi. (2024, Juni 15). *Masih banyak orang enggan pakai QRIS, BI ungkap tantangan transaksi digital*. Retrieved from

https://umkm.kompas.com/read/2024/06/15/103000883/masih-banyak-orang-enggan-pakai-qris-bi-ungkap-tantangan-transaksi-digital?page=all&utm_source

- Manurung, C. M., Sipahutar, J. N., Charolin, A., Saputra, Z. E., Hayim, H., William, J., ... & Tuan, S. (2024). Efektivitas program Q-RIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh Bank Indonesia dalam meningkatkan transaksi non-tunai. *GLORY: Global Leadership Organizational Research in Management*, 2(3), 68–88. <https://doi.org/10.59841/glory.v2i3.1310>
- News, Antara. (2024, Januari). *BI NTT catat transaksi QRIS Januari 2024 naik 141 persen*. Retrieved from <https://kupang.antaranews.com/berita/127524/bi-ntt-catat-transaksi-qris-januari-2024-naik-141-persen>
- Ningsih, H. A., Sasmita, E. M., & Sari, B. (2021). Persepsi risiko terhadap keputusan menggunakan uang elektronik (QRIS) pada mahasiswa. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v4i1>
- Nur, A., Grace, A., & Pontoh Darwis, T. (2025). Analisis perilaku penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard sebagai media pembayaran pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Bina Akuntansi*, 12(1), 24–32. <https://doi.org/10.52859/jba.v12i1.685>
- Opit, A. N., Budiarto, N. S., & Tangkuman, S. (2024). Efektivitas penerapan pembayaran online berbasis e-Samsat dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.58784/ramp.103>
- Puriati, N. M., Sugiartana, I. W., & Mertaningrum, N. P. E. (2023). Efektivitas penerapan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13(3), 332–338. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.70942>
- Rangkuti, F. A. V. (2024). Pengaruh persepsi kemanfaatan QRIS dan kemudahan QRIS terhadap efisiensi pembayaran digital pada mahasiswa UINSU. *Journal of Social Science Research*, 4(2), 7720–7727. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.10133>
- Srinadi, N. P. D. (2022). Efektivitas penggunaan QRIS pada penerimaan pajak. *Pajakku*. Retrieved from <https://artikel.pajakku.com/efektivitas-penggunaan-qris-pada-penerima-pajak>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Edisi 2, Cet. 1). Bandung: Alfabeta.
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat keamanan data melalui teknologi blockchain: Mengeksplorasi implementasi sukses dalam transformasi digital di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55–68. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>
- Zahra, R. (2024). Pengaruh implementasi kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya untuk mengukur tingkat literasi keuangan di Provinsi Lampung. *Jurnal*

Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, 2(1), 119–138.
<https://doi.org/10.37817/kybernology.v2i1>